



Judul : Skor literasi & sains siswa Indonesia alami kenaikan, alarm serius, 24 persen murid alami perundungan
Tanggal : Senin, 14 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Skor Literasi & Sains Siswa Indonesia Alami Kenaikan Alarm Serius, 24 Persen Murid Alami Perundungan

ORGANISASI untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merilis hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 pada 8 September 2026. Hasilnya, tingkat membaca, literasi dan sains siswa Indonesia mengalami peningkatan, termasuk perundungan.

Skor Membaca naik tujuh (7) poin menjadi 365 dan Sains naik enam (6) poin menjadi 389. Namun, skor Matematika Indonesia turun dua (2) poin menjadi 364.

PISA merupakan program evaluasi pendidikan global untuk mengukur kemampuan siswa. OECD sendiri berfokus pada tiga kemampuan dasar, yakni sains, matematika dan literasi atau membaca.

Peringkat Indonesia pun turun ke-74. Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-68 pada hasil PISA 2022. Akan tetapi, negara yang bergabung pada 2025 memang mengalami kenaikan menjadi 91 negara; sebelumnya hanya ada 81 negara.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim menilai kenaikan skor Sains harus terus diperkuat melalui pendekatan *Sains, Technology, Engineering, Art (STEAM)* dengan kombinasi ilmu-ilmu sosial humaniora.

Dari aspek Membaca, kenaikan skor Membaca murid Indonesia harus diperkuat dengan dukungan guru dan orang tua melalui pembiasaan dan budaya membaca buku, fiksi atau nonfiksi,

memahami ragam teks, grafik, infografis, tabel, serta statistik sederhana yang berkaitan dengan konten materi pelajaran.

"Pembiasaan dan pembudayaan membaca buku fiksi, nonfiksi, dan ragam jenis teks itu adalah tugas semua guru mata pelajaran, bukan hanya guru Matematika dan Bahasa Indonesia," kata Satriawan.

Kenaikan skor PISA tidak serta-merta menunjukkan seluruh persoalan pendidikan nasional telah teratasi. Di balik capaian tersebut, lingkungan

belajar masih menghadapi persoalan serius, salah satunya perundungan.

Data PISA 2025 menunjukkan sebanyak 24 persen murid Indonesia mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yakni 20 persen.

Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi P2G, mengatakan angka bullying harus menjadi

alarm bagi semua pihak agar fokus meminimalkan angka perundungan yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan. "Ini menjadi alarm bagi satuan pendidikan," ujar Iman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pencegahan *bullying* menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan dan pendapat Iman Zanatul Haeri dan Lalu Hadrian Irfani, berikut wawancaranya.

IMAN ZANATUL HAERI
Kabid Advokasi P2G

Kenaikan Bullying Alarm T Bagi Satuan Pendidikan



Pemerintah berkewajiban mendampingi, membimbing, dan membersamai satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, menghargai perbedaan, serta tidak menoleransi kekerasan.

Data Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia mengalami kenaikan, tetapi angka bullying masih tinggi. Bagaimana pandangan Anda?

Memang ada hal yang cukup mengkhawatirkan, yakni masih tingginya tingkat bullying atau perundungan berdasarkan data PISA 2025.

Berapa angkanya?

Sebanyak 24 persen murid Indonesia mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yakni 20 persen.

Apa respons Anda terhadap angka tersebut?

Ini menjadi alarm bagi satuan pendidikan untuk menciptakan ekosistem lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan terlindungi.

Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemendagri), dinas pendidikan, serta satuan pendidikan dituntut untuk membangun sistem sekolah atau madrasah yang aman dari berbagai bentuk kekerasan.

Bikin keamanan merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Bagaimana kualitas atau mutu pendidikan dapat dicapai jika murid mengalami kekerasan dan lingkungan belajarnya tidak aman.

Apa yang mesti dilakukan Pemerintah?

Pemerintah pusat dan Pemerintah

LALU HADRIAN IRFANI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Pencegahan Bullying Jadi Tanggung Jawab Semua



Data ini menunjukkan bahwa bullying bukan sekadar persoalan perilaku individual antarmurid. Ini sudah menjadi persoalan lingkungan belajar dan perlindungan anak yang harus ditangani secara sistematis.

Sebagai pimpinan Komisi X DPR, bagaimana pandangan Anda terkait data PISA yang menyebutkan angka 24 persen tingkat bullying?

Menurut saya, angka 24 persen murid Indonesia yang mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan perlu menjadi perhatian serius. Terlebih, angka tersebut berada di atas rata-rata negara-negara OECD yang mencapai 20 persen.

Dari data tersebut, apa yang menjadi permasalahannya?

Data ini menunjukkan bahwa bullying bukan sekadar persoalan perilaku individual antarmurid. Ini sudah menjadi persoalan lingkungan belajar dan perlindungan anak yang harus ditangani secara sistematis. Karena itu, pendekatannya tidak boleh

hanya berfokus pada penindakan ketika kasus terjadi. Pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban, hingga pemulihan juga harus menjadi bagian dari sistem penanganan di sekolah.

Apakah Pemerintah perlu membuat kebijakan yang konkret atas permasalahan ini?

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan, termasuk memastikan adanya mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan bagi korban, pendampingan psikologis, serta pembinaan terhadap pelaku.

Namun, kebijakan saja tidak cukup. Sekolah harus membangun budaya yang membuat murid merasa aman untuk belajar, bertanya, berbeda pendapat, dan melapor tanpa takut men-

dapat stigma maupun pembalasan.

Apakah perlu ada Satgas di setiap sekolah?

Menurut saya, perlu ada mekanisme atau tim penanganan yang jelas di setiap sekolah. Namun, jangan sampai pembentukan Satgas hanya menjadi formalitas administratif.

Yang lebih penting adalah memastikan adanya personel yang kompeten dan memiliki kewenangan, prosedur kerja yang jelas, kanal pengaduan yang mudah diakses, dan terjaga kerahasiannya, serta keterlibatan dengan orang tua, psikolog, dinas pendidikan, dan layanan perlindungan anak apabila kasusnya serius.

Selain itu, pencegahan bullying harus menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah, bukan hanya Satgas. ■ **REN**